

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Organisasi kemahasiswaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam peningkatan wawasan mengenai pendidikan demokrasi. Organisasi kemahasiswaan merupakan implementasi daripada teori-teori yang diperoleh diperkuliahan. Akan tetapi kemelekan politik sebagian mahasiswa dalam menentukan pilihan pimpinan organisasi masih rendah, dalam arti tidak semua pemilih melihat sosok pilihannya dari kapabilitas dan eksistensinya sebagai aktivis mahasiswa. akan tetapi dari fisik calon (ganteng) dan dari kedekatan antara pemilih dengan calon.

Diskusi politik merupakan kegiatan yang paling efektif untuk meningkatkan kemelekan politik dan kesadaran politik mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Diskusi tersebut dikemas melalui kegiatan “kajian” yang membahas isu-isu kampus sampai pada isu-isu seputar permasalahan politik di Indonesia, seminar pendidikan politik, pelatihan legislatif mahasiswa, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan adalah gejala apatisme mahasiswa terhadap organisasi (BEM REMA UPI) yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan kemahasiswaan oleh lembaga, kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi,

menurunnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap kinerja BEM REMA UPI, pembentukan paradigma cepat lulus oleh Universitas, orientasi mahasiswa masuk ke perguruan tinggi (UPI) adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (guru), ketidaksadaran mahasiswa akan pentingnya organisasi, serta adanya pandangan bahwa menjadi seorang aktivis itu harus siap untuk kuliah lama.

## 2. Kesimpulan Khusus

- a) Penerapan sistem demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia (REMA UPI) merupakan pengejawantahan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, dalam praktiknya pemerintahan mahasiswa (*student government*) di Universitas Pendidikan Indonesia menerapkan teori *trias politica* Montesque dengan membagi kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa, kekuasaan eksekutif oleh Badan Eksekutif Mahasiswa REMA UPI dan yudikatif oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan menyelenggarakan Sidang Umum MPM REMA UPI.
- b) Partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilu Raya Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI masih kurang, hal tersebut nampak dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilu. Dari 36.024 mahasiswa UPI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) hanya 9.502 mahasiswa yang memberikan suara dalam Pemira (kurang dari 50 %), padahal untuk dikatakan refresentatif pemilih yang memberikan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50% + 1. Akan tetapi jika mengacu pada

Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, maka nilai tersebut sudah representatif mengingat dalam UU tersebut jika jumlah pemilih yang memberikan suara lebih atau sama dengan 7500 orang, maka Pemilu dianggap sah. 7500 orang sudah dianggap mewakili suara keseluruhan, karena peraturan tersebut (UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden REMA UPI) dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

- c) Organisasi kemahasiswaan sebagai *miniature state* dapat menjadi media pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa. Adapun implementasi daripada budaya demokratis dalam organisasi kemahasiswaan tercermin dalam musyawarah mahasiswa/sidang umum yang mana mahasiswa bebas mengemukakan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat.
- d) Para Pembina kemahasiswaan memandang bahwa secara keseluruhan Ormawa di UPI telah mencerminkan fungsinya sebagai media pembelajaran demokrasi, salah satunya melalui musyawarah mahasiswa. Mahasiswa perlu belajar demokrasi karena ia akan menjadi panutan masyarakat ketika keluar dari bangku perguruan tinggi.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pemerintah**

- a. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda penerus bangsa mutlak untuk menerima pendidikan politik, khususnya pendidikan demokrasi. Optimalisasi Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan politik generasi muda harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Adanya koordinasi antara pemerintah dengan lembaga (Universitas) dalam memantau berjalannya proses demokratisasi dalam organisasi kemahasiswaan yang kemudian mensosialisikannya kepada mahasiswa agar fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium demokrasi bagi mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **2. Untuk Lembaga (Universitas Pendidikan Indonesia)**

- a. Universitas memiliki tanggungjawab dalam memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan, salah satunya adalah menyediakan sekretariat yang *representatif* untuk kegiatan kemahasiswaan.
- b. Dalam membuat sebuah peraturan terkait organisasi kemahasiswaan harus senantiasa menjunjung asas *win win solution*, dalam arti penyusunan peraturan melibatkan mahasiswa sebagai masukan bagi terciptanya sebuah peraturan yang dapat diterima oleh semua.
- c. Peraturan-peraturan terkait dengan mahasiswa hendaknya disosialisasikan seoptimal mungkin, agar tidak terjadi miskomunikasi antara lembaga dan mahasiswa.

### 3. Untuk REMA UPI

- a. Organisasi kemahasiswaan sebagai media pembelajaran demokrasi harus dapat mengimplementasikan faham-faham demokrasi dalam sebuah organisasi kemahasiswaan seperti adanya pembagian kewenangan, tanggungjawab, kewajiban yang harus dilaksanakan dan kebebasan.
- b. Permasalahan yang melanda organisasi kemahasiswaan di UPI adalah dalam hal partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan organisasi, untuk itu perlu ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir semua mahasiswa.
- c. Harus dilakukan nasionalisme organisasi terhadap keseluruhan mahasiswa UPI dalam rangka membentuk karakter mahasiswa UPI yang bangga dengan almamaternya.
- d. Perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan kerjasama antara REMA UPI dengan ormawa-ormawa yang lain agar organisasi kemahasiswaan di UPI dapat berjalan searah.
- e. REMA UPI harus menjalankan fungsinya sebagai *center information* bagi ormawa lainnya, tidak hanya bagi satu kelompok saja.

### 4. Untuk Ormawa UPI pada umumnya

- a. Kaderisasi merupakan hal fundamental dalam membentuk karakter dan pribadi mahasiswa, untuk itu kaderisasi harus dilaksanakan secara khafah, berkesinambungan dan mempunyai arah yang jelas berdasarkan karakteristik ormawa masing-masing dan dilakukan dengan

memperhatikan kondisi mahasiswa, tegas, dan sedapat mungkin meminimalisir senioritas dalam penyelenggaraan organisasi

- b. Kaderisasi dalam organisasi kemahasiswaan harus dapat mengimplementasikan militansi kelembagaan dan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, terbebas dari kepentingan individu dan atau golongan, bertujuan untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, bakat dan kemampuan mahasiswa, tidak dijadikan kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan, serta mencerminkan *value global* yang dapat diterima oleh semua.
- c. Setiap ormawa harus memiliki acuan/kurikulum untuk melakukan kaderisasi, yakni memancing dialektika, menghargai perbedaan, dan menyenangi adanya perbedaan
- d. Dalam kaderisasi harus disampaikan pemahaman-pemahaman terkait tujuan organisasi, fungsi organisasi, dan sebagainya yang dapat mendukung tercapainya misi organisasi
- e. Kaderisasi tidak hanya dilakukan secara formal, akan tetapi dapat juga dilakukan dalam suasana non formal dengan cara membawa nuansa lain dalam ormawa, seperti rasa keluargaan, kesetiakawanan, dan menjunjung tinggi sikap saling mengerti dan memahami.
- f. Pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa melalui pengembangan ormawa harus dilakukan, hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *student organization models*

## 5. Untuk mahasiswa UPI

- a. Aktivitas dalam organisasi merupakan salah satu hal yang menunjang kegiatan akademis, bukan menghambat akademis. Untuk itu sebagai mahasiswa yang harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan yang luas, maka harus bergabung dalam sebuah organisasi.
- b. Peningkatan wawasan dan kecedikiawanan tidak dapat berjalan secara instan, oleh karena itu ketika bergabung dalam sebuah organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan haruslah sampai tuntas dalam arti sampai kita merasa cukup dan memperoleh manfaat dari aktivitas di organisasi.

